



PENJUALAN ROKOK ILEGAL DI KOTA YOGYA

Layani COD, Modus Operandi Bergeser

YOGYA (MERAPI) - Tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai Pabean B Yogyakarta dan aparat penegak hukum mendapati 3.460 batang rokok ilegal dari hasil operasi sepanjang Januari-Oktober 2024.

Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta, Ahmad Hidayat menyebut, jumlah tersebut didapatkan dari giat operasi gempur rokok ilegal sebanyak 10 kali. Operasi terakhir pada 29 Oktober ditemukan sebanyak 2.760 batang rokok ilegal.

Operasi cukai rokok ilegal itu sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Ia menyampirkan temuan rokok ilegal itu langsung disita dan dibawa ke Kantor Bea Cukai Yogyakarta. Sedangkan para penjualnya dikenai denda administratif dengan maksimal 4 kali cukai rokok. Sanksi denda juga diterapkan langsung maupun diproses berita acara pemeriksaan di Kantor Bea Cukai.

"Karena sanksinya menurut PMK yang baru, dikenakan sanksi administratif denda langsung

di lokasi dengan minimal dua kali lipat harga cukai. Misalnya rokoknya dibanderol harga Rp 15.000, berarti satu bungkusnya dikenakan denda minimal Rp 30.000 dan bisa sampai empat kali lipat harga cukai. Jadi masyarakat kalau menjual rokok ilegal, untungnya tidak seberapa tapi kerugiannya sangat terasa," jelasnya, Rabu (6/11).

Selain itu Satpol PP Kota Yogyakarta juga menemukan rokok ilegal di salah satu warung kuliner di kawasan Kridosono dan tempat parkir. Termasuk adanya indikasi metode penjualan rokok ilegal dengan sistem cash on delivery (COD) di beberapa tempat di Kota Yogyakarta.

"Sekarang modus operandinya bergeser. Dari yang tadinya dijual di warung-warung rokok yang eceran, sekarang kita terakhir mendapatkan malah yang menjual itu di toko aksesoris selular

atau konter pulsa. Itu setelah dilakukan penyelidikan oleh teman-teman kami di intelijen yang tidak berseragam. Kami melakukan penyelidikan selama kurang lebih satu minggu itu juga ada dasar laporan dari masyarakat," terangnya.

Pihaknya berharap apabila masyarakat menemukan rokok yang tidak memiliki pita cukai dapat melaporkan ke Satpol PP Kota Yogyakarta. Termasuk tidak menjual rokok ilegal karena rokok yang tidak dilengkapi pita cukai itu merugikan negara.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat menyampaikan, penegakan cukai rokok ini penting karena DBHCHT yang masuk ke pemerintah juga masuk ke pemerintah daerah. Dia menjelaskan DBHCHT dimanfaatkan 50 persen untuk dukungan BPJS Kesehatan, 40 persen untuk mendukung bantuan langsung tunai bagi pekerja di pabrik pengolahan tembakau dan edukasi ke mereka, serta 10 persen dimanfaatkan untuk operasi penegakan cukai rokok di wilayah Kota Yogyakarta.



Petugas Satpol PP temukan penjualan rokok ilegal.

MERAPI-Dok Pemkot Yogya

"Keberadaan Satpol PP Kota Yogyakarta dalam penegakan cukai rokok di Kota Yogyakarta akan terus menjadi bagian dari komitmen bersama dengan tim teman-teman dari Bea Cukai untuk memberantas keberadaan rokok-rokok ilegal tanpa cukai di wilayah Kota Yogyakarta," kata Octo.

Dalam penegakan cukai rokok ilegal di wilayah Kota Yogyakarta, Satpol PP Kota Yogyakarta bekerja sama dengan banyak pihak. Termasuk kewilayahan akan terus mengoptimalkan kegiatan operasi. Tidak hanya menyisir di daerah perbatasan tapi juga di tengah wilayah Kota Yogyakarta. (C-12)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005